

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam perkembangan sejarahnya, perjalanan bangsa Indonesia tidak dapat dilepaskan dari peran dan jasa umat Islam sebagai kelompok mayoritas¹ ditunjukkan dengan komitmennya yang utuh dalam meletakkan dasar kehidupan bernegara sebagaimana yang dicita-citakan. Sejarah mencatat, keteguhan dan kegigihan umat Islam melawan segala sesuatu yang menindas, menghisap dan menjajah² berbuah pada berdirinya sebuah republik dengan segenap kehormatannya. Kesetiaan umat terhadap negara juga terbukti melalui perjuangan terdempannya dalam menaklukkan ideologi komunis, menghambat pengaruhnya bahkan mengikis kegiatan dan gerakan bawah tanah mereka.

Kepedulian umat Islam dalam melakukan perubahan demi perubahan dilandasi atas pemikiran bahwa perubahan menuju arah yang lebih baik sangat

¹ Terdapat sedikitnya lima cara dalam mendefinisikan apakah umat Islam di Indonesia dapat disebut sebagai mayoritas atau minoritas. *Pertama*, umat Islam didefinisikan sebagai himpunan orang yang menyatakan dirinya sebagai pemeluk agama Islam. *Kedua*, umat Islam didefinisikan sebagai himpunan orang yang sudah menjalankan ritus-ritus keagamaan atau ibadat seperti sholat, zakat, puasa dan haji. *Ketiga*, umat Islam adalah himpunan orang yang memiliki pengetahuan yang memadai atau lebih dari itu tentang ajaran Islam. *Keempat*, umat Islam adalah himpunan orang yang berusaha mengatur perilakunya di tengah-tengah masyarakat sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. *Kelima*, umat Islam adalah himpunan orang yang terlibat secara ideologis dengan ajaran Islam. Lihat Jalaluddin Rahmat, *Islam di Indonesia Masalah Definisi*, dalam Amien Rais (ed.) *Islam di Indonesia Suatu Ikhtiar Mengaca Diri*, Jakarta, CV.Rajawali, 1986, hal.42

² Prof. W.F.Wertheim dalam bukunya "*Indonesia Society in Transition*" mengatakan "Islam had become of many Indonesian symbol of resistance to the Hindu Caste System". Lihat Muhammad Syamsu As, *Ulama Pembawa Islam di Indonesia dan Sekitarnya*, Jakarta, Lentera, 1996, hal.173

dianjurkan dalam Islam. Konsep perubahan dalam doktrin Islam³ khususnya demi kemaslahatan umat manusia membuktikan bahwa Islam adalah agama yang dinamis, selalu tanggap merespons aktualitas perkembangan dalam konteks sosial kemasyarakatan.

Sebagai petunjuk bagi manusia, Al Qur'an menyediakan suatu dasar yang kukuh dan tak berubah bagi semua prinsip-prinsip etik dan moral yang perlu bagi kehidupan⁴ sebagai sumber hukum dan pegangan hidup muslim, ia merupakan inspirator yang kreatif bagi setiap pemikiran dan gerak langkah umat khususnya dalam menjawab tantangan problematika umat tidak saja berkait dengan masalah kehidupan *ukhrawi* namun juga masalah kekinian yang membutuhkan penanganan segera dan nyata.

Kehadiran Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah dan sosial keagamaan dapat dilihat dalam konteks merespon tantangan yang ada di lingkungannya. Hal ini tidak lain karena Muhammadiyah lahir, tumbuh dan berkembang dalam sebuah realitas sosial yang sarat persoalan. Dan karena itu pula Muhammadiyah terdorong untuk berupaya melepas belitan persoalan yang membelenggu umat dan bangsa.

Semangat pembaruan yang melekat dalam diri Muhammadiyah diawali dengan kebutuhan untuk melakukan purifikasi atau pemurnian ajaran Islam yang dianggap menyeleweng dari yang telah digariskan oleh Islam. Pola penyebaran –

³. Salah satu ayat dalam Al Qur'an yang sering disitir berkait dengan perubahan adalah Ar-ra'd:11

⁴. Ahmad Syafi'i Maarif, *Islam dan Masalah Kenegaraan Studi tentang Percaturan dalam Konstituante*, Jakarta, LP3ES, 1985, hal.11

khususnya di Jawa – yang berjalan melalui penyesuaian dengan tradisi-tradisi yang telah berabad-abad umurnya, sebagian tradisi penduduk asli, sebagian tradisi Hindu – Budha, memberi warna kental pada munculnya amalan yang menyimpang seperti *takhayul, bid'ah dan khurafat*.

Selain itu, kesadaran akan lemahnya pengelolaan dan pembinaan potensi umat serta dalam upaya melakukan pemberdayaan kaum muslim menuntun Muhammadiyah untuk menekuni wilayah praktis sosial⁵ berupa dakwah bil halal, yakni ajakan dan himbauan lewat amalan dan tindakan nyata. Cara ini ditempuh melalui kegiatan penyantunan anak yatim, pendirian Rumah Sakit, penyelenggaraan pendidikan dan sebagainya, sebagai wujud dari aktualisasi terhadap ajaran normativitas Al Qur'an yang bersifat membumi dan sejjin dengan perkembangan serta perubahan histories zaman.

Fleksibilitas Muhammadiyah dalam zaman yang terus ini memaksa Muhammadiyah turut memikirkan bahkan mencarikan penyelesaian terhadap problematika umat dan realitas sosial yang hidup di luar dirinya.

Meskipun demikian, keterlibatan Muhammadiyah yang memberi kontribusi nyata dalam bidang sosial keagamaan tidak lantas membuatnya melupakan bidang-bidang yang menyangkut nasib umat secara keseluruhan.

Politik adalah salah satu persoalan yang hampir pasti menciptakan sikap pro kontra dan mempengaruhi dinamika intern Muhammadiyah. Respon

⁵. Istilah praksis sosial dirujuk dari tulisan M.Amin Abdullah, *Pendekatan Teologi dalam Memahami Muhammadiyah, dalam Intelektualisme Muhammadiyah Menyongsong Era Baru*, Kelompok Studi Lingkaran (ed.), Jakarta, Mizan, 1995, hal.27

mengenai perlu tidaknya Muhammadiyah terjun ke wilayah politik praktis selalu menjadi agenda yang tidak pernah terselesaikan secara tuntas. Kenyataan ini wajar mengingat politik merupakan persoalan sensitive karena bersentuhan dengan kekuasaan. Pola hubungan Muhammadiyah dengan negara lebih banyak dipengaruhi oleh bagaimana sikap Muhammadiyah terhadap politik yang sedang berkembang.

Persinggungan Muhammadiyah dengan politik secara signifikan adalah ketika Muhammadiyah menjadi pendukung utama berdirinya Masyumi sebagai kelanjutan dari Majelis Islam A'la Indonesia (MIAI). Hampir semua organisasi Islam, baik lokal maupun nasional, kecuali Perti, mendukung kehadiran Masyumi sebagai satu-satunya partai politik umat Islam di Indonesia yang mengkhususkan perjuangannya di bidang politik dalam rangka menegakkan ajaran Islam dalam wadah Indonesia merdeka⁶.

Pada masa Orde Baru, setelah beberapa waktu bergabung dengan Sekber Golkar kemudian menyatakan diri keluar darinya, Muhammadiyah ikut membidani berdirinya Partai Muslimin Indonesia (Parmusi). Namun karena kudeta yang dilakukan Naro terhadap kepemimpinan Parmusi, Djarnawi Hadikoesoemo dan Lukman Harun (keduanya dari Muhammadiyah), Muhammadiyah merumuskan ulang aktivitas politiknya dalam mendukung Parmusi. Aktivitas politik yang dimaksudkan untuk memperjuangkan kepentingan umat, justru menghasilkn sebaliknya, karena dimana tokoh yang bermain

⁶ A. Syafi'i Maarif, *Islam dan Politik di Indonesia pada Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965)*, IAIN Sunan Kalijaga Press, Yogyakarta, 1988, hal.30

didalamnya saling “cakar-cakaran” dan memperebutkan posisi masing-masing. Pada waktu itu Naro menuduh kedua pimpinan Parmusi dari Muhammadiyah tersebut telah keluar dari kebijaksanaan pemerintah dan ABRI dianggap membawa parati ini pada posisi oposisi terhadap pemerintah. Peristiwa ini mendorong Muhammadiyah keluar dari Parmusi politik Sidang Tanwir tahun 1970.⁷

Kegagalan dalam politik untuk yang kedua kalinya tersebut, mendorong Muhammadiyah untuk tidak lagi terlibat secara aktif dalam kegiatan politik praktis seperti tercermin dalam keputusan Muktamar Muhammadiyah di Ujung Pandang tahun 1971. Pengalaman ini tampaknya turut mewarnai corak politik yang dikembangkan Muhammadiyah di kemudian hari.

Pada gilirannya, penciptaan dan pemeliharaan stabilitas nasional mengharuskan pemerintah mengambil langkah-langkah pertama, menciptakan politik yang bebas dari konflik ideologis dan berdasarkan atas ketertiban dan konsensus, kedua, membatasi partisipasi politik yang pluralistic sekaligus partisipasi rakyat tersebut diarahkan terutama pada penerapan program pembangunan yang dirancang oleh para elit penguasa.⁸

Pilihan terhadap strategi yang diterapkan tentu saja lebih pada bagaimana agar kekuatan sosial politik di masyarakat dapat dijinakkan sehingga tidak merintangai laju pembangunan. Pengharapan yang awalnya ditumpukan di pundak

⁷ Sutrisno, “Wajah Muhammadiyah: Dulu, Kini dan Akan Datang”, dalam *Masyarakat dan Negara Kado Untuk Prof. Sutandyo Wignjosebroto*, I. Basis Susilo (ed.), Surabaya, Airlangga University Press, 1997, hal.139

⁸ Mohtar Mas’oed, *Politik, Birokrasi dan Pembangunan*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1994, hal.35

Orde Baru untuk menampakkan watak santunnya dan memulai babak baru hubungan yang lebih menguntungkan ternyata tidak didapati umat Islam sebagai kenyataan. Apa yang terjadi kemudian merupakan perulangan sejarah Orde Lama yang selalu memojokkan umat Islam. Islam di Indonesia baik ormas, organisasi politik maupun sayap politik Islam lainnya, sebagaimana dikatakan W.F.Wertheim's kemudian tidak lebih sebagai "*majority with a minority mentality*". Semua ini tidak dapat dijelaskan dari pencitraan dan sikap pemerintah beserta militer terhadap kelompok-kelompok dalam Islam yang mereka anggap sebagai kekuatan yang perlu diwaspadai.

Sikap Islamophobia pemerintah memang pada akhirnya menimbulkan kegelisahan dan kekhawatiran umat Islam. Sejumlah penangkapan, pemenjaraan dan stigmasi dilakukan terhadap mereka yang dianggap membahayakan negara.

Kasus Komando Jihad, Teror Warman, pembajakan pesawat terbang Garuda "woyla", masalah boleh tidaknya murid sekolah berjilbab dan lain-lain, mengindikasikan bahwa kaum sempalan dalam Islam di Indonesia memilih jalan konvensional dalam memperjuangkan aspirasi politik mereka.⁹

Dinamika dalam Muhammadiyah sendiri, terutama yang menyangkut hubungannya dengan negara banyak dipengaruhi oleh konstelasi politik yang berkembang. Pada periode ini Muhammadiyah membatasi keterlibatannya dalam politik dengan tidak menjadi pendukung dari salah satu partai politik yang ada.

⁹ Afan Gaffar, *Politik Akomodasi : Islam dan Negara di Indonesia, dalam Agama, Demokrasi dan Keadilan*, M.Imam Azis, M.Jadul Maula, Ellyasa, KH.Darwis (peny.), Jakarta, Gramedia, 1993, hal.104

Aktivitas politik Muhammadiyah sejak saat itu lebih banyak berkaitan dengan garis kebijakan organisasi yaitu sebagai upaya untuk menjalankan *amar ma'ruf nahi munkar*.¹⁰

Terlebih sejak tahun 1968 – 1990, Muhammadiyah dipimpin oleh seorang kyai bersahaja dengan pembawaan lemah lembut. Seirama dengan penampilan beliau yang kalem, kultur yang terbangun membuat Muhammadiyah lebih tertarik memusatkan kegiatan-kegiatannya pada bagaimana melaksanakan syiar dan dakwah yang sejuk dan damai, menata secara lebih baik organisasi dan amal usaha yang ada daripada bergumul dengan kegaduhan dan kebisingan politik. Lobi politik ataupun sebatas memberi saran pemikiran pada setiap kebijakan pemerintah merupakan pilihan paling realistis dan strategis bagi keterlibatan politik Muhammadiyah.

Tingkat estafet yang diserahkan kepada Azhar Basyir kurang lebih menunjukkan kecenderungan yang serupa yaitu sikap *tawadlu* melanjutkan tradisi sikap Muhammadiyah yang senantiasa berusaha menghindari konfrontasi dengan pemerintah. Sikap demikian lebih menguntungkan bagi kelangsungan gerak langkah Muhammadiyah di masa depan.

Wafatnya Azhar Basyir sebelum masa kepemimpinannya berakhir, menandai munculnya isu seputar kelangkaan ulama dan figure kepemimpinan ulama dalam lingkungan Muhammadiyah. Dalam tempo yang sama, terjadi

¹⁰ Sutrisno, dalam *op.cit*, hal.140

proses menguatnya pergeseran atau transformasi kearah kepemimpinan cendekiawan.

Proses ini makin menemukan bentuknya ketika Mukhtamar ke-43 pada Juli 1995 di Banda Aceh mengamanatkan Amien Rais menduduki jabatan Ketua Pengurus Pusat Muhammadiyah Periode 1995-2000.

Amien Rais dikenal publik sebagai seorang cendekiawan kampus yang jujur, sederhana namun lugas. Pergumulannya dengan pemikir-pemikir Islam “radikal” mengundang tuduhan tak sedap terhadap dirinya. Pemikiran Amien Rais dianggap sebagai sectarian karena ingin memperjuangkan Islam lewat jalur *formal structural*. Ia bersama kelompok Islam lain – bahkan dituding ingin mendirikan negara Islam di Indonesia. Terlebih ketika ia masuk jajaran pengurus ICMI yang dicurigai oleh politisi sebagai kendaraan politik untuk menggapai cita-cita memformalkan Islam dalam negara.

Sebagai seorang ahli politik tidak mudah bagi Amien Rais untuk menghindarkan diri dari pergulatan politik meski berada dalam posisi puncak kepemimpinan Muhammadiyah, sebuah organisasi yang lebih dikenal sebagai gerakan keagamaan non-politik. Pada tahun 1993, Amien Rais melontarkan gagasan suksesi dalam Sidang Tanwir Surabaya, dan gagasan *high politics* menjelang Mukhtamar Muhammadiyah ke-43.

Gagasan besar ini mengundang reaksi yang beragam. Sambutan positif mengalir dari para cendekiawan, aktivis pro demokrasi mahasiswa dan kelompok masyarakat lain yang mendambakan lahirnya demokrasi sesungguhnya di

Indonesia. Sebaliknya tantangan, penolakan dan juga resistensi dirasakan begitu kuat datang, baik dari sebagian kalangan pengurus Muhammadiyah terlebih pejabat pemerintah.

Gagasan –gagasan orisinal yang diusungnya sebagai buah dari perenungan panjang dalam melihat keprihatinan yang melanda bangsa banyak dituangkan dalam bentuk tulisan maupun diskusi dalam ruang publik yang lebih luas terutama setelah krisis menerpa Indonesia.

Bagi sebagian pengurus Muhammadiyah, sikap yang diambil Amien Rais dianggap sebagai merusak kembali hubungan baik yang tengah dijalin antara Islam dengan pemerintah. Kendati Amien Rais selalu mengatakan bahwa pendapatnya tidak mengatasnamakan organisasi, namun mereka merasa imbasnya tetap akan diterima Muhammadiyah dan umat Islam secara keseluruhan.

Ijtihad politik yang dilakukan Amien Rais dalam rangka *amar ma'ruf nahi munkar* dilakukan dengan karakter khasnya. Pematangan ide dari suksesi nasional sebagai sebuah keniscayaan hingga pencalonan dirinya sebagai presiden menemukan momen yang tepat ketika persediaan basis kepercayaan yang dimiliki pemerintah mulai menipis akibat ketidakberesannya mengurus negara yang makin kacau dilanda krisis multi dimensi.

Upaya radikalisasi massa mendapat sambutan luar biasa tidak saja masyarakat intelektual di kampus namun juga melibatkan masyarakat akar rumput yang merespon tuntutan perubahan dengan caranya sendiri.

Puncak ketegangan antara pemerintah dengan rakyat terjawab manakala pilar penyangga Orde Baru runtuh pada tanggal 21 Mei 1998. Meski hal tersebut tidak menjamin bahwa sisa kekuatan Orde Baru sepenuhnya telah tumbang, akan tetapi pemerintahan darurat Habibie tampaknya mempunyai itikad baik dengan sedikit memberi ruang bagi keterbukaan dan membuka proses demokratisasi dengan menyelenggarakan Pemilihan Umum demi terciptanya sebuah pemerintahan yang memiliki basis legitimasi yang kuat di mata rakyat.

Keterlibatan Amien Rais dalam reformasi politik yang “menantang secara terang-terangan” terhadap rezim yang masih berkuasa ternyata menyisakan problem dilematis bagi Muhammadiyah. Di satu sisi, Muhammadiyah bukanlah organisasi politik dan karenanya cenderung menjauhi wilayah politik praktis. Ada kekhawatiran Muhammadiyah terjerumus dalam permainan politik yang justru akan merugikannya secara kelembagaan. Posisinya sebagai Ketua Umum dikhawatirkan akan berimbas pada memburuknya hubungan Muhammadiyah dengan negara.

Namun di sisi lain tidak dapat dipungkiri bahwa keterlibatan Amien Rais lebih disebabkan oleh kepeduliannya sebagai anak bangsa yang tidak ingin melihat Indonesia terjerumus ke lubang kehancuran akibat mempertahankan sesuatu yang tidak mungkin diperbaharui tanpa pergantian sebuah rezim.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, penulis berusaha meneliti:

“Bagaimana keterlibatan Muhammadiyah dalam reformasi politik di Indonesia pada masa kepemimpinan Amien Rais periode 1995-2000 ?”

D. KERANGKA KONSEPTUAL

1. Muhammadiyah dan Pembaruan

1.1 Konsep Pembaruan dalam Islam

Konsep pembaruan dalam Islam sedikitnya dapat merujuk pada dua istilah yakni *tajdid* dan *ijtihad*. *Tajdid* secara harfiah berarti pembaruan; pelakunya disebut mujadid. *Tajdid* berarti pembaruan dalam hidup keagamaan, baik berbentuk pemikiran ataupun gerakan, sebagai reaksi atau tanggapan terhadap tantangan-tantangan internal maupun eksternal yang menyangkut keyakinan dan urusan sosial umat.¹³

Tajdid merupakan upaya menetapkan norma-norma agama atas realitas sosial untuk memenuhi kebutuhan perkembangan masyarakat dengan berpegang pada dasar-dasar (*ushul*) yang sudah diletakkan oleh agama itu, melalui proses pemurnian yang dinamis.¹⁴ *Tajdid* bukan berarti mengganti ajaran-ajaran dan hukum-hukumnya yang bersifat mutlak, fundamental dan universal yang sudah tertuang dalam ketentuan-ketentuan yang otentik (*qath'iyat*). Tetapi *tajdid* itu mempunyai ruang gerak yang cukup luas dalam hal memperbaharui cara memahami, menginterpretasi, mereformulasi dan melakukan *teopassing* atas ajaran-ajaran agama, yang berada di luar wilayah *qath'iyat*, yaitu ketentuan-ketentuan yang sifatnya *zhanniyat* yang menjadi wilayah kajian *tajdid*.¹⁵

¹³ *Ensiklopedi Islam*, PT Ihtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1994, hal.42

¹⁴ Ali Yafie, "Tajdid Adakah Suatu Kemestian?", *Pesantren*, No. I/Vol.V/1988, hal.6

¹⁵ *Ibid*

Untuk lebih memahami makna *tajdid* ini, perlu ada perbedaan antara upaya pembaruan yang lebih bersifat teknis dalam hal-hal kemasyarakatan dan keduniawian (seperti masalah-masalah ekonomi, politik, teknologi, pendidikan dan lain sebagainya) yang tidak langsung menyangkut asas-asas keimanan dan norma-norma dasar yang sudah ditentukan secara pasti dalam ajaran agama (Islam). Pembaruan seperti di atas disebut *tajdid 'urfi* dimana penalaran manusia mempunyai kebebasan yang luas sekali untuk menggarapnya dan mengembangkannya. Berbeda halnya dengan pembaruan yang ada kaitannya secara langsung dengan asas-asas keimanan dan norma-norma dasar yang sudah ditetapkan secara pasti dalam ajaran agama itu, yang membentuk sistem keyakinan dan hukum syari'at (seperti masalah halal-haram, keabsahan menurut agama dan sebagainya). Pembaruan di bidang ini disebut *tajdid syar'i*, dimana penalaran diberikan kebebasan dalam batas-batas kaidah-kaidah tertentu yang dikenal dengan *ushul fiqh*, untuk mencapai hasil penemuan yang dapat dipertanggungjawabkan dalam keyakinan keagamaan.¹⁶

Sedangkan *ijtihad* berarti mengerahkan segala tenaga dan pikiran untuk menyelidiki dan mengeluarkan (meng-istinbat-kan) hukum-hukum yang terkandung di dalam Al Qur'an dengan syarat-syarat tertentu.¹⁷

Ijtihad dilakukan oleh para ulama untuk menjawab persoalan dalam masyarakat yang bersifat dinamis dan senantiasa mengalami perubahan dan

¹⁶ *Ibid*, hal.6

¹⁷ *Ensiklopedi Islam 2*, PT Ichtiar Baru, Van Hoeve, Jakarta, 1994, hal.183

berkembang mengikuti peredaran zaman.¹⁸ Ijtihad hanya dilakukan terhadap masalah yang tidak ditemukan dalil hukumnya secara pasti dalam Al Qur'an dan As Sunnah.¹⁹

Begitu pentingnya ijtihad itu dilakukan, sehingga ahli ushul fiqh menetapkan bahwa hukum ijtihad itu ada tiga macam yaitu *fardhu ain* (wajib bagi setiap muslim), *fardhu kifayah* (cukup dilakukan oleh sebagian muslim) dan *mandub*(sunah).²⁰

Mengenai perubahan dan pembaruan ini, Islam memang memberi landasan penegasan baik dalam Al Qur'an maupun hadist.²¹ Muhammad Iqbal mengatakan bahwa :

Dasar kehidupan spritual yang utama di mata Islam bersifat kekal dan membuka diri terhadap perubahan. Suatu masyarakat yang didasarkan atas konsepsi realitas semacam itu harus berpegang teguh pada ketetapan dan menyesuaikan diri dengan perubahan. Dia harus memiliki prinsip-prinsip kekal untuk mengatur kehidupan kolektifnya, sebab yang kekal itu memberikan kepada kita pijakan yang kokoh di dunia yang selalu mengalami perubahan ini. Kalau prinsip itu dipahami untuk menolak segala kemungkinan perubahan yang menurut Al Qur'an merupakan salah satu dari tanda-tanda Tuhan yang paling agung, maka

¹⁸. *Ibid*, hal. 184

¹⁹ *Ibid*

²⁰. *Ibid*, hal. 185

²¹. *Ibid*

mereka cenderung menghentikan apa-apa yang pada hakekatnya memiliki sifat selalu bergerak.²²

Pembaruan Islam sendiri sejatinya merupakan upaya melakukan penafsiran Al Qur'an dengan pendekatan rasional dan kontekstual.²³ Pembaruan Islam adalah rasionalisasi pemahaman Islam dalam kontekstualisasi nilai-nilai Islam ke dalam kehidupan sebagai salah satu pendekatan pembaruan Islam, rasionalisasi mengandung arti upaya pengaitan substansi tersebut dengan pelataran sosial budaya tertentu dan kemungkinan penggunaan lambang-lambang budaya tersebut untuk membungkus kembali substansi tersebut.²⁴

Sepanjang sejarah Islam, adalah Rasullullah SAW orang yang memberi tauladan bagi dilaksanakannya sebuah perubahan total atas kondisi umat pada masa jahiliyah. Fazlur Rahman mencatat berbagai prestasi Nabi dalam menegakkan otoritas politik dengan cara melakukan berbagai perbaikan perbaikan dan pembaruan di Madinah antara lain pengurangan kesenjangan ekonomi melalui mekanisme zakat, persamaan hak bagi budak dan wanita, mengusahakan

²² Salah satu ayat dalam Al Qur'an, misalnya QS.7 : 170, membahas tentang keharusan melakukan perbaikan. Sedangkan salah satu hadist nabi Muhammad SAW riwayat Abu Daud mengatakan bahwa Allah akan mengutus orang-orang untuk memperbarui urusan agama pada permulaan tiap abad.

²³ Muhammad Iqbal, *The Reconstruction of Religious Thought in Islam* (Acyraf, Lahore, 1974) hal. 147 dalam Ziauddin Sardar, *Rekayasa Masa Depan Peradaban Muslim*, Jakarta, Mizan, 1986, hal. 54

²⁴ M. Din Syamsuddin, "Mengapa Pembaruan Islam?", *Jurnal Ulumul Qur'an*, No.1/Vol.IV/1993, hal. 54

keadilan bagi semua orang, menerapkan etika berpolitik yang sehat, belas kasih antara sesama manusia dan sebagainya.²⁵

Demikianlah sesungguhnya Islam melalui Al Qur'an dan Hadist memberikan landasan yang baik secara konseptual maupun empiris bagi kaum Muslim untuk senantiasa melakukan perubahan dan pembaruan demi kemaslahatan umat.

1.2. Muhammadiyah Sebagai Gerakan Pembaruan

Yang dimaksud sebagai “Gerakan” adalah terus bergerak aktif, selalu berada di depan, penuh inisiatif dan perencanaan serta menggunakan organisasi sebagai alat perjuangan.²⁶ Sebuah gerakan juga mengandung arti “proses dinamis dan sistematis yang merupakan dua sisi mata uang dari sebuah proses sejati”²⁷.

Pengertian gerakan pembaruan sendiri, sebagaimana dikemukakan oleh Awad Bahasoan, merupakan:

Rentetan aksi yang dilancarkan secara sadar untuk merumuskan atau membentuk kembali pola dan tatanan yang telah mengalami

²⁵ Secara lebih lengkap simak Fazlur Rahman, *Islam Modern Tantangan Islam*, Yogyakarta, Shalahuddin Press, 1987, hal.15

²⁶ Musthafa Kamal Pasha dkk, *Muhammadiyah sebagai Gerakan Islam*, Yogyakarta, Persatuan, 1976, hal.45

²⁷ M.Dien Syamsuddin, Muhammadiyah dan NU: Mengikhtisarkan Wawasan Sosial Politik Baru, dalam *Muhammadiyah dan NU, Reorientasi Wawasan KeIslaman*, Yunahar Ilyas dkk (ed.), Yogyakarta, LPPI UMY, LKPSM NU, PPAI-Muksin, 1993, hal.97

perubahan-perubahan, baik yang bersifat revolusioner maupun perubahan yang dialami secara bertahap dan evolusioner.²⁸

Ia tidak semata-mata menunjuk kepada substansi atau isi dari tujuan-tujuan perubahannya melainkan dari proses dimana pembaruan dilakukan.²⁹ Ini berarti bahwa suatu gerakan pembaruan yang dapat dianggap sebagai indikator dari dinamika masyarakat, bisa muncul pada golongan dan kelompok apapun dan masyarakat manapun.³⁰

Secara fundamental, gerakan Islam yang memiliki corak pembawaan umumnya akan selalu menyatakan bahwa sumber utama motivasi gerakan adalah pemahaman dan internalisasi dari para pemimpin gerakan atas solusi dan keputusan Al Qur'an berkenaan permasalahan spesifik dengan kerangka legislasi bagi tujuan keadilan sosial dan pembangunan masyarakat yang egalitarian.³¹ Pemahaman dan internalisasi tersebut kemudian disimpulkan dalam bentuk "prinsip umum" yang disepakati sebagai ide yang akan diterapkan untuk memperbaiki keadilan sosial secara terus menerus.³² Hal ini sejalan dengan makna sebenarnya gerakan pembaruan Islam yang berkeinginan mengembalikan seluruh sistem ajaran struktur sosial dan cara berfikir kaum muslimin kepada dasar-dasar lamanya yang kokoh, yaitu Al Qur'an dan As Sunnah.³³

²⁸ Awad Bahasoan, *"Gerakan Pembaharuan Islam: Interpretasi dan Kritik"*, Prisma, No Ekstra, 1984, hal.107

²⁹ Ibid

³⁰ Ibid

³¹ MT Arifin, *Gagasan Pembaharuan Muhammadiyah*, Jakarta, Pustaka Jaya, 1987, hal.133

³² Ibid

³³ Tatang M.Natsir, *Di Sekitar Reformasi dan Modernisasi Masyarakat Islam*, Bandung, Al Maarif, 1972, hal.15

Berpegang pada pemahaman di atas, maka Muhammadiyah dapat dikategorikan sebagai gerakan tajdid atau gerakan pembaruan. Gerakan tajdid Muhammadiyah sebenarnya mengandung dua makna sekaligus yakni sebagai gerakan pemikiran dan gerakan kelembagaan.³⁴ Gerakan pemikiran Muhammadiyah dapat ditelusuri melalui motivasi awal berdirinya yang menghendaki pemurnian ajaran Islam dari praktek *bid'ah*, *khurafat* dan *takhayul*. MT Arifin menyebut Muhammadiyah sebagai “gerakan yang diilhami oleh kegelisahan intelektual yang berakar pada perbedaan pemikiran keagamaan yang didasarkan atas penafsiran amaliah melalui pendekatan keilmuan”.³⁵

Dikatakan oleh Mahrus Irsyam bahwa kekuatan sebuah pemikiran bukan terletak pada pendukungnya, bukan pada wadah organisasinya, dan bukan pula sekedar pemikiran itu sebagai sesuatu yang lain dari pemikiran yang telah ada.³⁶ Kekuatan sebuah pemikiran terkandung di dalam pemikiran itu sendiri, berupa kemampuan menawarkan alternatif baru dan perspektif baru.³⁷ Dalam konteks inilah pemikiran yang dikembangkan Muhammadiyah dapat digolongkan sebagai pemikiran pembaruan.

Sebagai gerakan kelembagaan, Muhammadiyah senantiasa menterjemahkan anjuran untuk kembali kepada normativitas Al Qur'an dan As

³⁴ Kuntowijoyo, *Pokok Pikiran Pembentukan Majelis Pengembangan Masyarakat*, hal.207 dalam *Pergumulan Pemikiran Muhammadiyah*, Syukrianto AR dan Abdul Munir Mul Khan (peny.), Yogyakarta, Sypress, 1990

³⁵ MT.Arifin, Pak AR dan ideologi Tajdid, hal.49, dalam *Pak AR Profil Kyai Merakyat*, Emha Ainun Najib dkk, Yogyakarta, Dinamika, 1995

³⁶ Mahrus Irsyam, *Islam di Indonesia: Pengembangan Oorganisasi dan Gerakan Pemikiran*, *Prisma 4*, 1990, hal.38

³⁷ Ibid

Sunnah dengan melakukan penyesuaian dan modifikasi tertentu pada dataran historisitas kemanusiaannya.³⁸ Pembentukan organisasi-organisasi yang bersifat *associational* dan *voluntary*³⁹ berupa yayasan pemeliharaan yatim piatu, lembaga-lembaga pendidikan, rumah sakit, bahkan menyediakan gerakan kaum perempuan merupakan bukti aktualisasi "ijtihad" Muhammadiyah terhadap ayat Al Qur'an. Atau dengan kata lain, gerakan kelembagaan merupakan bagian dari realitas empirik. Sehingga dalam perkembangannya, letak kebaruan Muhammadiyah bukan lagi pada tatanan perbedaan dalam praktek ibadah melainkan pada dinamika pemikiran dan praktek keagamaan yang melahirkan perubahan sosial.

1.3. Muhammadiyah Sebagai Kelompok Kepentingan

Pada hakekatnya, kelompok kepentingan adalah suatu organisasi yang terdiri dari sekelompok individu yang mempunyai kepentingan-kepentingan, tujuan-tujuan dan keinginan yang sama; dan mereka melakukan kerjasama untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah demi tercapainya kepentingan-kepentingan, tujuan-tujuan dan keinginan-keinginan tersebut.⁴⁰

Sebagai keluarga yang terorganisasi, mereka tidak hanya memiliki sistem keanggotaan yang jelas, tapi juga memiliki pola kepemimpinan, sumber keuangan

³⁸ Abdullah *op.cit*, hal.30

³⁹ Kuntowijoyo, *loc.cit*

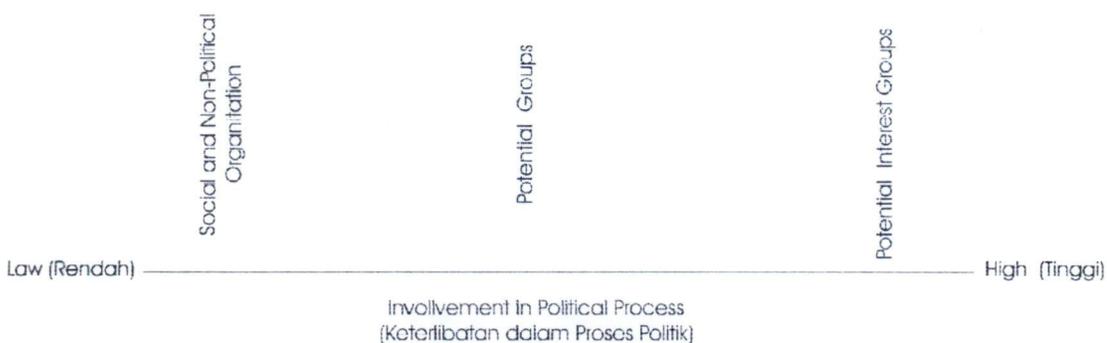
⁴⁰ Haryanto, *Sistem Politik Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty, 1982

untuk membiayai kegiatan, dan pola komunikasi baik ke dalam maupun keluar organisasi.⁴¹

Berbeda dengan partai politik yang tujuan utamanya berupaya meraih jabatan politik dan mempertahankannya lewat Pemilihan Umum atau cara-cara lain yang sah sebagai sarana untuk memperjuangkan alternatif kebijakan umum menjadi keputusan politik, kelompok kepentingan sesuai dengan namanya memusatkan perhatian pada bermakna mengartikulasikan kepentingan tertentu kepada pemerintah sehingga pemerintah menyusun kebijakan yang menampung kepentingan kelompok.⁴²

Kelompok kepentingan diklasifikasikan menjadi beberapa tipe selaras dengan bermacam patokan. Berdasarkan tinggi rendah keterlibatannya dalam proses politik, Ronald J. Hrebenar dan Ruth K. Scott membagi kelompok kepentingan menjadi tiga bagian yaitu: organisasi sosial politik, kelompok potensial dan kelompok kepentingan politik (lihat gambar).⁴³

Gambar 1.1



⁴¹. Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta, 1992

⁴² *Ibid*

⁴³. Ronald J. Hrebenar and Ruth K. Scott, *Interest Group Politics in America*, Prentice Hall, Inclewood Cliffs, USA, 1982, hal.4

Gambar 1.1 adalah sebuah kontinum yang didasarkan pada derajat keterlibatan dalam proses politik. Kategorisasi ini membantu kita memisahkan bermacam kelompok dan memudahkan kita untuk mengeliminasi secara cepat sebagai fokus utama perhatian kelompok-kelompok tersebut yang tidak berpartisipasi secara efektif dalam proses politik. Meskipun kegiatannya berkuat pada masalah-masalah sosial, akan tetapi ketika berada dalam situasi luar biasa, kelompok sosial non politik akan ikut juga dalam proses politik dan terlibat kontak dengan proses politik.⁴⁴

Kelompok potensial adalah kategori menarik dari orang-orang yang disatukan dengan kepentingan yang sama yang belum terorganisir dan biasanya bukan merupakan bagian tetap dari proses politik.

Sedangkan kelompok kepentingan politik adalah kelompok yang secara intens berpartisipasi dalam melobi pemerintah atau kebijakan umum. Sebenarnya mereka dapat dibagi dalam sub kategori: orientasi pribadi dan kelompok kepentingan publik, kelompok yang berorientasi pribadi berusaha mencapai beberapa tujuan kebijakan yang akan menguntungkan secara langsung anggota-anggotanya. Sebaliknya, kelompok kepentingan publik mencari keuntungan dimana mereka tidak berusaha mencari keuntungan bagi anggota-anggotanya secara langsung namun akan dinikmati oleh masyarakat umum.⁴⁵

⁴⁴ *Ibid*

⁴⁵ *Ibid*, hal.5

kelompok inilah yang menunjukkan kecenderungan penentu perkembangan dari jenis kelompok kepentingan lain.

Muhammadiyah, dengan melihat intensitas keterlibatan politiknya mungkin dapat digolongkan ke dalam organisasi sosial non politik yang perannya sebatas berupaya melakukan lobi terhadap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah khususnya dalam hal-hal yang sifatnya mendesak. Namun, jika diamati secara serius sebenarnya ia juga memainkan peran besar dan pengaruh terhadap perkembangan dan proses-proses politik di tanah air, seperti saat menjadi penyokong utama partai Masyumi atau membidani lahirnya Parmusi. Sehingga dalam hal ini ia melampaui peran sebagai organisasi sosial dan memainkan peran sebagai kelompok kepentingan politik.

Demikian pula apabila meminjam kategorisasi dari Almond, maka Muhammadiyah pun memenuhi karakteristik sebagai kelompok kepentingan institusional sekaligus asosiasi mengingat kekhasan yang dimilikinya.⁴⁷

2. Reformasi Politik

2.1 Pengertian Reformasi Politik

Sejarah konsepsi reformasi, berakar kepada perubahan kehidupan agama di abad ke-16, dimana kekolotan ulama penguasa agama Katolik ditentang oleh kalangan sendiri yang melihat berbagai kejanggalan, untuk kemudian melancarkan reformasi agama dalam bentuk aliran Protestan⁴⁷. Dan sejak saat itu,

⁴⁷ Arbi Sanit, *Reformasi Politik*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1998, hal.99

⁴⁸ Syamsuddin Haris, *Reformasi Setengah Hati: Sebuah Gugatan Pengantar dalam Reformasi Setengah Hati*, Jakarta, Erlangga, 1999, hal.9

reformasi dipraktekkan ke segenap aspek kehidupan khususnya dalam upaya memperbaiki proses kehidupan sosial, ekonomi dan politik.

Secara sederhana reformasi dapat didefinisikan sebagai upaya penataan kembali kehidupan berbangsa dan bernegara ke arah yang lebih baik.⁴⁸

Atau menurut Kacung Marijan, reformasi memiliki makna terjadinya perubahan-perubahan menyeluruh tentang struktur politik, berikut peran-peran dan pemegang peran di dalam struktur itu.⁴⁹ Reformasi menuntut terjadi penyingkiran struktur politik otoriter dan digantikan dengan struktur politik yang demokratis.⁵⁰ Perubahan-perubahan tersebut juga harus dilakukan dengan cara yang demokratis, konstitusional dan damai.⁵¹

Reformasi merupakan perubahan kehidupan masyarakat jalan tengah antara evolusi dan revolusi.⁵² Pengertian dan proses reformasi bergerak diantara kemiripan atau kedekatan cirinya kepada evolusi dan revolusi. Mendekati evolusi, reformasi dimaknai sebagai perubahan sosial yang diprakarsai dan dilaksanakan oleh semua pihak, berkenaan dengan perubahan seluruh aspek kehidupan, berlangsung secara perlahan atau dalam jangka panjang, dan berproses secara alami, dalam artian tanpa didasarkan kepada suatu rencana yang dipercepat.⁵³

Dalam hal reformasi politik, perubahan mendekati evolusioner berlangsung pada teknis pelaksanaan kehidupan politik dengan tujuan

⁴⁹ Kacung Marijan, Ketika Makna Reformasi Dipahami Secara Berbeda, dalam *Dari Bilik Suara Masa Depan Indonesia Potret Konflik Politik Pasca Pemilu dan Nasib Reformasi*, Gouzali Saydam (ed.), Jakarta, Rajagrafindo Persada, 1999, hal.48

⁵⁰ *Ibid*

⁵¹ *Ibid*

⁵² Sanit, *op.cit*, hal.100

⁵³ *Ibid*

meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses politik tanpa merubah prinsip, ketentuan dan struktur dasarnya.⁵⁴

Sebaliknya, di bawah kecenderungan yang mendekati revolusi, reformasi digerakkan dan diprakarsai oleh masyarakat untuk melakukan perubahan segenap aspek kehidupan secara mendasar, berlangsung cepat sehingga saling tidak menghiraukan jumlah dan kualitas korban, apalagi mengingat prosesnya yang kental diwarnai oleh kekerasan.⁵⁵ Secara politis, revolusi selalu membawa pergantian kerangka dasar kehidupan politik, seperti ideologi dan konstitusi, sehingga memberi arahan kepada perombakan total struktur, kultur dan proses kehidupan politik dan segenap aspek kehidupan lainnya.⁵⁶

Secara analitis, terdapat tiga dimensi atau lapisan reformasi yang harus dibedakan.⁵⁷

Pertama, perbaikan terhadap semua penyimpangan yang terjadi termasuk didalamnya korupsi, kolusi dan nepotisme serta pelanggaran hak asasi manusia. Kedua, penghapusan segala faktor, baik berupa perundangan dan hukum serta kelembagaan, maupun sistem politik, yang telah memungkinkan penyimpangan itu terjadi. Ketiga, peletakan dasar baru dari kehidupan kenegaraan.

Usaha peletakan landasan baru kehidupan kenegaraan tersebut dapat dilakukan melalui tiga tahap yaitu: penggambaran masyarakat bangsa yang dikehendaki, mendapatkan kearifan dari pengalaman sejarah yang telah ada dan kini sedang dialami bangsa sendiri dan bangsa lain, dan berupaya merumuskan rencana bagi masa depan bangsa dan negara yang lebih baik.

⁵⁴. *Ibid*

⁵⁵. *Ibid*, hal.101

⁵⁶. *Ibid*

⁵⁷. Sutrisno, *loc.cit*

2.2 Demokrasi dan Demokratisasi

Kecenderungan demokratisasi pada suatu negara dan masyarakat ditentukan oleh faktor lingkungan yang biasanya menentukan prinsip, sistem dan proses Pemilu, yang berawal dari perkembangan atau perubahan masyarakat. Perubahan alami masyarakat sebagai produk dari unsur-unsur dampak positif dan negatif pembangunan yang tampaknya sangat menentukan kecenderungan demokratisasi masyarakat. Pola perubahan masyarakat seperti ini memang lebih dimungkinkan oleh ketidakjelasan dan ketidakkonsistenan (sistematik) program demokratisasi yang diselenggarakan oleh pemerintah.

Demokrasi adalah masalah hak, pelaksanaan akan hak itu, menuntut pemenuhan beberapa syarat: *free electoral competition, relatively open information system, respect for civil liberties and the right of free political association*. Syarat-syarat ini harus menjamin kemungkinan *the changeable nature of voters and the ability to switch governing parties*.⁵⁸ Demokratisasi (politik) dengan demikian dapat diartikan sebagai upaya (proses) peningkatan kualitas terhadap syarat-syarat ini, sehingga individu warga negara memiliki kesempatan yang lebih luas dan lebih baik untuk ikut mempengaruhi penyusunan agenda politik, sekaligus mengawasi pelaksanaan agenda itu. Tidak ada satu negarapun yang secara sempurna memenuhi persyaratan di atas, dalam arti seluruh syarat-syarat itu diterapkan pada derajat kepentingan yang sama, karena sejarah membuktikan bahwa demokrasi menjadi sangat penting disaat membangun satu rezim politik. Setelah rezim itu berkuasa maka demokrasi akan mengendur kembali. Fakta inilah yang membuat banyak orang curiga dengan

⁵⁸. Afan Gaffar, *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1999

sejarah membuktikan bahwa demokrasi menjadi sangat penting disaat membangun satu rezim politik. Setelah rezim itu berkuasa maka demokrasi akan mengendur kembali. Fakta inilah yang membuat banyak orang curiga dengan proses demokratisasi yang berlangsung saat ini. Sebab isu demokratisasi gencar disuarakan bersamaan dengan isu regenerasi kepemimpinan. Boleh jadi ini hanya isu temporal yang akan segera berakhir begitu rezim politik baru ditegakkan.⁵⁹

Implementasi demokrasi di dunia memiliki hubungan erat dengan pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia (human rights). Dalam demokrasi modern, dalam konteks politik hak asasi merupakan keterkaitan gagasan timbal balik yang berdasarkan kewarganegaraan dimana warga negara memiliki hak dan kewajiban dalam komunitas. Untuk menjamin perlindungan dan pengakuan terhadap hak asasi tersebut tentunya harus mendapat legalitas hukum dari negara, sehingga apa yang mendasari prinsip demokrasi adalah nilai dasar dari hak asasi itu sendiri yakni otonomi dan persamaan.⁶⁰

Demokrasi yang sehat adalah bilamana partisipasi masyarakat menjadi dominan dan terlibat dimana-mana untuk menetapkan kebijakan-kebijakan yang bersifat publik.

⁵⁹. Afan Gaffar, *Politik Indonesia Orde Baru: Negara, Masyarakat dan Reformasi Menuju Demokrasi*, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1998

⁶⁰. Afan Gaffar, *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1999

3. Kepemimpinan

3.1. Kepemimpinan Secara Umum

Kepemimpinan merupakan suatu proses dengan berbagai cara mempengaruhi orang atau sekelompok orang untuk mencapai suatu tujuan bersama.⁶¹ Pengertian kepemimpinan akan timbul di manapun manakala terdapat unsur-unsur: (a) adanya orang yang dipengaruhi; (b) adanya orang yang mempengaruhi; (c) orang yang mengarahkan kepada tercapinya suatu tujuan.⁶²

Secara sosiologis, Weber mengemukakan tiga bentuk tipe atau gaya ideal kepemimpinan, yaitu:

1. Kepemimpinan karismatik, yaitu kepemimpinan yang didasarkan pada kemampuan alami, seperti mukjizat, karisma atau kewibawaan di luar rasio. Kepemimpinan ini adalah kemampuan atau kekuatan batin, yang ada padanya dan didukung oleh kondisi masyarakatnya. Kekayaan, umur, kesehatan, profil bahkan pendidikan formal tidak menjadi kriteria.
2. Kepemimpinan tradisional, yaitu kepemimpinan yang diterima berdasarkan tradisi yang berlaku dalam komunitas masyarakat atau dinasti tertentu yang dominan dan diterima masyarakat. Seseorang diangkat menjadi pemimpin secara turun temurun dari satu keluarga atau dinasti tertentu.
3. Kepemimpinan rasional, yaitu kepemimpinan yang mendasarkan wewenangnya pada kekuatan formal dan legalistic yang memperoleh kedudukan berdasarkan rasio dan diterima dari bawahannya secara rasio.

⁶¹. Charles J. Keating, *Kepemimpinan Teori dan Perkembangannya*, alih bahasa A.M Mangunhardjana, Yogyakarta, Kanisius, 1986, hal.9

⁶² Sunindha dan Ninik Widiyanti, *Penerapan Manajemen dan Kepemimpinan dalam Pembangunan*, Jakarta, Bina Aksara, 1998, hal.43

Maka pengangkatan seseorang menjadi pemimpin berdasarkan persetujuan sebagian besar masyarakat atau diangkat berdasarkan kewenangan atasan dan diterima berdasarkan hukum.⁶³

Sementara George R. Terry membagi pemimpin menjadi enam tipe, yakni:⁶⁴

1. Tipe pribadi. Kepentingan pribadi dibuktikan oleh adanya kontak pribadi yang langsung dari si pemimpin dengan orang-orangnya. Kepemimpinan semacam ini biasanya sangat efektif di dalam usaha apapun, baik yang kecil maupun besar.
2. Kepemimpinan yang non-pribadi. Pimpinan tidak dirasakan langsung, melainkan lewat bawahannya atau melalui cara-cara yang “non-personal” seperti rencana, instruksi, sumpah dan janji, “interaction” (saling berhubungan) antara pemimpin dan bawahannya berjalan tidak langsung, jadi lambat.
3. Kepemimpinan otoriter. Pemimpin seperti ini menganggap *leadership* sebagai haknya dan berpendapat bahwa ia dapat menentukan apa dan bagaimana sesuatu harus dikerjakan. Pengawasannya sangat tegang.
4. Kepemimpinan yang demokratis. Golongan bawahannya turut serta memberikan pendapat mereka. Ini merupakan kebajikannya, terutama jika anggota-anggota golongan itu sendiri adalah orang-orang yang cakap dan cerdas. Jika tidak demikian, atau jika mereka tidak mempunyai keinginan untuk bekerja sama dan mengejar cita-cita yang murni, maka tipe ini akan gagal pula.

⁶³ Dikutip dari Andi Wahyudi, *Muhammadiyah dalam Gonjang-ganjing Politik Telcah Kepemimpinan Muhammadiyah Era 1990-an*, Yogyakarta, Media Pressindo, 1999, hal.28-29

⁶⁴ George R.Terry, *Principles of Management*, Irwin, 1956 dalam Panglaykim dan Hazil, *Manajemen Suatu Pengantar*, Jakarta, Ghalia Indonesia, cetakan ke-16, 1986, hal.50-51

5. Kepemimpinan yang paternalistis. Si pemimpin menjaga bawahannya seperti seorang datuk menjaga kemenakannya atau anak semangnya, melindungi, memimpin. Biasanya kepercayaan akan diri sendiri dan kesanggupan sendiri dari para bawahannya tidak berkembang.
6. Kepemimpinan yang terdapat di dalam rombongan yang setujuan.

Dalam kebanyakan kelompok, pemimpin tidak dimaksudkan untuk menggantikan gagasan dan bakat para anggota, melainkan untuk menghimpin sumber kekuatan itu demi tugas kelompok.⁶⁵ Esensi bagi seorang pemimpin adalah menggerakkan orang-orangnya untuk bekerja sama menuju suatu tujuan yang baik, yang mereka inginkan dan yang baik sebagai pernyataan *self express*.⁶⁶ Hal ini menuntut kepemimpinan yang lebih “merakyat”, pola kekuasaan personal yang diungkapkan dengan memotivasi, memberikan kemudahan dan mengkoordinasi kegiatan orang lain.⁶⁷

Sehubungan dengan proses mempengaruhi para anggota kelompok yang dipimpinnya, tipe seorang pemimpin dapat dilihat dari cara memimpinya.⁶⁸

1. Pemimpin otoriter adalah pemimpin yang dalam melaksanakan kepemimpinan selalu bertindak sendiri. Pemimpin ini bertindak sangat direktif, selalu memberi pengarahan, dan tidak memberi kesempatan timbulnya partisipasi.⁶⁹ Kepemimpinan seperti ini cenderung memberikan perhatian individual ketika memberikan pujian dan kritik, tetapi berusaha

⁶⁵ Evelyn Whitehead, *Kepemimpinan dan Kekuasaan Sebuah Tinjauan Sosial Agama*, Pusat Pastoral Yogyakarta, 1996, hal.31

⁶⁶ Panglaykim dan Hazil, *op.cit*, hal.55

⁶⁷ Whitehead, *loc.cit*

⁶⁸ Salahuddin Sanusi, *Pembahasan Sekitar Prinsip-prinsip Dakwah Islam*, Semarang, CV. Ramadhani, 1964, sebagaimana dikutip AR Fakhruddin, *Kepemimpinan Muhammadiyah Masa Mendatang dalam Pergumulan Pikiran....op.cit*, hal.149

⁶⁹ Miftah Thoha, *Kepemimpinan dalam Manajemen*, Jakarta, CV.Rajawali, 1983, hal.24

untuk lebih bersikap impersonal dan berkawan dibandingkan dengan bermusuhan secara terbuka.⁷⁰

2. Pemimpin demokratis adalah pemimpin yang dalam melaksanakan kepemimpinan selalu mengikutsertakan rakyatnya atau pengikutnya. Misalnya dalam pengambilan keputusan ia selalu memperhatikan pendapat-pendapat pengikutnya bahkan mengajak bawahannya untuk bermusyawarah. Pemimpin jenis ini mempunyai sikap terbuka, bersedia dikritik dan dapat berbeda pendapat.⁷¹
3. Pemimpin *laissez faire* adalah pemimpin yang dalam menjalankan roda kepemimpinannya selalu menyerahkan semua kebijakannya kepada bawahan-bawahannya. Sang pemimpin tidak ikut campur dan hanya membiarkan saja.⁷²

Dari penelitian yang dilakukan oleh Mc Clelland diketahui bahwa para pemimpin yang berhasil, mampu menunjukkan baik kekuasaan personal, yaitu kemampuan berorganisasi yang diperlukan untuk menghargai dan mengkoordinasi berbagai kekuatan kelompok, maupun ketegasan personal yang diperlukan untuk mengilhami keterlibatan dan komitmen kelompok.⁷³

3.2 Kepemimpinan Dalam Muhammadiyah

Posisi ulama dalam kepemimpinan Muhammadiyah semakin menjadi perbincangan masyarakat khususnya ahlulbait di kalangan Muhammadiyah. Tidak terdapat penjelasan yang representatif mengenai perbedaan antara ulama dan

⁷⁰ *Ibid*

⁷¹ Sanusi, *loc.cit*

⁷² *Ibid*

⁷³ Whitehead, *op.cit*, hal.31-32

intelektual. Namun demikian disadari bahwa tampilnya kelompok intelektual dalam kepemimpinan Islam di Indonesia sejak tahun 1970-an mempunyai pengaruh terhadap gerak dan dinamika sosial dan politik komunitas Muslim negeri ini.

Sementara itu, telah sejak lama Muhammadiyah dianggap mulai mengalami kelangkaan ulama. Masalah apa dan siapa sesungguhnya yang dimaksud dengan ulama dan bagaimana hubungan dengan organisasi gerakan Islam seperti Muhammadiyah itu sendiri juga belum jelas. Karena itu menjadi menarik untuk mengkaji siapa dan apa yang dimaksud dengan ulama dan mengapa memiliki posisi sentral dalam setiap pergantian kepemimpinan organisasi Islam.

Searah dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan dan perkembangan masyarakat, berbagai analisis justru menyatakan ada kecenderungan semakin merosotnya fungsi dan peran sosial ulama. Anehnya, Mukhtamar Muhammadiyah di Aceh 1995 justru muncul usaha menempatkan ulama pada posisi puncak sebagai ketua dalam kepemimpinan Muhammadiyah. Muncul pertanyaan apa sesungguhnya yang menjadi latar belakang munculnya semacam tuntutan tampilnya ulama untuk memimpin Muhammadiyah. Pertanyaan dan tuntutan tersebut agaknya perlu dijernihkan sehingga tidak menyesatkan.

Secara tradisional, ulama dalam kehidupan masyarakat dipandang memiliki beberapa fungsi dan sekaligus posisi. Fungsi dan posisi demikian berhubungan dengan kemampuan profesional ulama yaitu sebagai kelompok orang yang dipandang memiliki kemampuan intelektual memahami dan

menjelaskan maksud ajaran Islam. Kemampuan ini kemudian diterjemahkan oleh masyarakat sebagai kemampuan membaca khasanah pemikiran Islam klasik sebagaimana dikenal dengan kitab kuning.

Kemampuan tersebut di atas, menjadi latar belakang masyarakat untuk menempatkan ulama dalam posisi khusus dalam kehidupan sosial masyarakat Islam. Lebih lanjut posisi itu kemudian menjadi jalan bagi ulama untuk menempati berbagai posisi politik, ekonomi dan bahkan budaya, sehingga secara sosiologis ulama ditempatkan sebagai panutan masyarakat. Dalam beberapa kasus tertentu, ulama menjalankan fungsi yang lebih fundamental dan teologis yaitu sebagai mediator hubungan manusia dengan Tuhan.

Dalam perkembangan lebih lanjut, apakah seseorang memiliki kemampuan profesional menterjemahkan makna ajaran Islam atau membaca kitab klasik tidak atau diuji ulang. Namun demikian, perlu disadari bahwa amat banyak orang yang memiliki kualifikasi ulama namun justru jarang tampil di tengah masyarakat dalam wajah yang demikian.

Dalam hubungan dengan kepemimpinan, adalah suatu kenyataan bahwa tidak secara otomatis seseorang yang memiliki kualifikasi ulama dalam pengertian tradisional, baik karena pengakuan masyarakat ataupun karena kemampuan intelektualnya mampu menjadi pemimpin yang baik. Sebaliknya banyak pemimpin yang baik justru tidak memiliki dan tidak dikenal memiliki kualifikasi sebagai ulama dalam pengertian tradisional di atas. Masalahnya adalah, apakah fungsi dan wilayah kerja pemimpin Islam dan atau pemimpin organisasi Islam hanya berkaitan dengan masalah kemampuan membaca kitab kuning, atau lebih luas meliputi kemampuan membimbing dan menggerakkan

umat dan masyarakat luas menyelesaikan berbagai masalah kehidupan obyektifnya dalam kerangka kemanusiaan, kemasyarakatan dan kebangsaan yang lebih luas.

Konsep kepemimpinan Muhammadiyah tidak hanya dapat disederhanakan hanya dengan keharusan tampilnya ulama dalam pengertian tradisional sebagai puncak pimpinan. Sebaliknya, justru karena Muhammadiyah benar-benar menaruh perhatian terhadap berbagai masalah kemanusiaan, kemasyarakatan dan kebangsaan yang lebih luas, pemimpin Muhammadiyah baik secara individual ataupun kolektif harus memiliki komitmen terhadap berbagai fungsi sosial, kemanusiaan dan kebangsaan yang harus dan dapat mereka jalankan.

Muhammadiyah, yang mengidentifikasi dirinya sebagai gerakan Islam amarmakruf nahi munkar dalam format ke-Indonesia-an, tidak bisa tidak menjadi prasarat konseptualisasi bagi kepemimpinan dalam Muhammadiyah yang harus memiliki kualifikasi kemampuan tidak saja dalam memahami ajaran Islam tetapi suatu pemahaman yang fungsional bagi penyelesaian berbagai masalah kemanusiaan, kemasyarakatan dan kebangsaan sekaligus.

Makna ulama dalam kepemimpinan Muhammadiyah seharusnya dikonsepsi sesuai fungsi-fungsi diatas. Sebagaimana selalu dinyatakannya sendiri, Islam dalam pandangan Muhammadiyah adalah Islam yang menaruh komitmen pada masalah kemanusiaan, kemasyarakatan, kebangsaan sekaligus. Cara pandang demikian sudah dengan sendirinya menjadikan konseptualisasi ulama dalam pandangan Muhammadiyah tidak hanya terbatas pada kemampuan membaca kitab kuning, tetapi mempunyai kemampuan membaca seluruh gejala kehidupan manusia baik dalam hubungannya dengan Tuhan, maupun dalam hubungannya

ketawadluan yang dalam terhadap norma keagamaan, (6) dan terakhir memiliki wawasan yang luas serta keterbukaan jiwa seluas lautan.⁷⁵

E. Definisi Konseptual

1. Organisasi Muhammadiyah

Muhammadiyah adalah organisasi Islam modernis yang didirikan oleh KH. Ahmad Dahlan pada tanggal 8 Dzulhijjah 1320 H atau bertepatan dengan tanggal 18 Nopember 1912 di Yogyakarta. Maksud didirikannya untuk mengajak dan mengajarkan ajaran Islam yang sebenar-benarnya yang bersumber pada Al Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, serta menggerakkan dan membimbing umat Islam di Indonesia agar dapat mengamalkan ajaran tersebut dalam kehidupan sehari-hari, baik sebagai pribadi maupun sebagai anggota masyarakat dan bangsa Indonesia.

2. Reformasi Politik

Reformasi politik adalah upaya penataan kembali kehidupan berbangsa dan bernegara ke arah yang lebih baik. Atau bisa dikatakan bahwa reformasi memiliki makna terjadinya perubahan-perubahan menyeluruh terhadap struktur politik, berikut peran-peran dan pemegang peran di dalam struktur itu.

Reformasi menuntut terjadinya penyingkiran struktur politik otoriter dan digantikan oleh struktur politik yang demokratis. Perubahan-perubahan tersebut juga harus dilakukan dengan cara yang demokratis, konstitusional dan damai.

⁷⁵ Abdul Munir Mulkhan, *Menggugat Muhammadiyah*, Yogyakarta, CV. Adipura, 2000, hal.59-

3. Peran Muhammadiyah dalam pergantian kepemimpinan nasional

Gagasan "*high politics*" yang dilontarkan oleh Amien Rais mengundang reaksi beragam. Sambutan positif mengalir dari para cendekiawan, aktivis pro demokrasi mahasiswa dan kelompok masyarakat lain yang mendambakan lahirnya demokrasi sesungguhnya di Indonesia. Upaya radikalisasi massa mendapat sambutan luar biasa tidak saja masyarakat intelektual di kampus namun juga melibatkan masyarakat akar rumput yang merespon tuntutan perubahan dengan caranya sendiri. Puncak ketegangan antara pemerintah dengan rakyat terjawab manakala pilar penyangga Orde Baru runtuh pada tanggal 21 Mei 1998. Meski hal tersebut tidak menjamin bahwa sisa kekuatan Orde Baru sepenuhnya telah tumbang, akan tetapi pemerintahan darurat Habibie tampaknya mempunyai itikad baik dengan sedikit memberi ruang bagi keterbukaan dan membuka proses demokratisasi dengan menyelenggarakan Pemilihan Umum demi terciptanya sebuah pemerintahan yang memiliki basis legitimasi yang kuat di mata rakyat.

F. Definisi Operasional

Dalam penelitian ini peran Muhammadiyah dalam pergantian kepemimpinan dari Soeharto ke Habibie akan dideskripsikan kedalam beberapa indikator agar lebih terarah, yaitu:

Peran Muhammadiyah dalam pergantian kepemimpinan dari Soeharto ke Habibie

- Membentuk opini tentang perlunya suksesi
- Mendukung aksi-aksi mahasiswa
- Melontarkan *high politics*
- Menyetujui regenerasi elit
- Mendukung proses demokratisasi yang masih jauh dari apa yang diharapkan
- Menyetujui agenda reformasi yang ingin membrantas korupsi, kolusi dan nepotisme.

G. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan pertimbangan pada faktor-faktor yang berkaitan dengan topik penelitian, informasi yang dibutuhkan, persepsi tentang realitas dan ketersediaan bahan serta didasarkan pula pada prinsip-prinsip teoritis dan metodologis berupaya kesesuaian metodologi dengan tujuan-tujuan teoritis, daya jangkau metodologi terhadap obyek penelitian, realisasi aturan-aturan metodologi yang juga meliputi kemungkinan-kemungkinan dan keterbatasan-keterbatasannya, dan pertimbangan-pertimbangan yang menyangkut beberapa pra kondisi yang memungkinkan atau tidak memungkinkan diterapkannya analisa statistik⁷⁶ maka penelitian yang akan ditempuh adalah penelitian kualitatif.

Pilihan terhadap jenis penelitian kualitatif ini juga didasari atas adanya kritik terhadap metode kuantitatif dari positivisme yang dianggap gagal mengungkap realitas sosial yang beragam.⁷⁷ Peneliti cenderung bekerja berdasar logika deduktif, mengabaikan keunikan dan kurang menempatkan objek sebagai pelaku kreatif dan dinamis.⁷⁸

Penelitian kualitatif didefinisikan oleh Bogdan dan Taylor (1975)⁷⁹ sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara *holistic* (utuh). Jadi, dalam

⁷⁶ Bambang Purwoko, *Rancangan Penelitian* (makalah tidak diterbitkan), Lembaga Penelitian UGM, 1999, hal.3

⁷⁷ Abdul Munir Mul Khan, *Islam Murni dalam Masyarakat Petani*, Yogyakarta, Benteng, 2000, hal.31

⁷⁸ *Ibid*

⁷⁹ Seperti yang ditulis oleh Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosda Karya, Bandung, 1990

hal ini tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi ke dalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan.⁸⁰

Penelitian dengan pendekatan kualitatif lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah.⁸¹ Studi ini akan menggunakan perpaduan dua metode yakni metode historis dan metode deskriptif. Metode historis merupakan "suatu usaha untuk memberikan interpretasi dari bagian trend yang naik turun dari suatu status keadaan dimasa lampau untuk memperoleh suatu generalisasi yang berguna untuk memahami kenyataan sejarah, membandingkan dengan keadaan sekarang dan dapat meramalkan keadaan yang akan datang."

Upaya memahami fenomena keterlibatan Muhammadiyah dalam politik khususnya di masa lampau dan mengapa tidak larutnya Muhammadiyah tidak asing dengan terminologi pembaharuan, sebagian dapat dicapai dengan menggali sumber-sumber informasi dan data yang ada pada masa lalu. Hal ini sesuai dengan yang diutarakan oleh Hadari Nawawi dan Martini Hardani, bahwa data masa lalu dipergunakan sebagai info untuk memperjelas kejadian atau keadaan sekarang, karena merupakan rangkaian peristiwa yang tidak terputus atau saling berhubungan satu dengan yang lain.⁸²

Sedangkan penelusuran dengan dinamika pembaharuan pada tahun-tahun terakhir menjelang keruntuhan Orde Baru dan juga analisis terhadap apa yang dilakukan oleh Muhammadiyah bagi reformasi politik akan dilakukan dengan

⁸⁰. *Ibid*

⁸¹. *Ibid*

⁸². Hadari Nawawi dan Martini Hardani. Instrumen Penelitian Bidang Sosial, Yogyakarta, Gajah Mada University Press. 1992, hal 66

menerapkan metode deksriptif dengan jalan menata dan mengklasifikasi gejala-gejala yang hendak dilukiskan⁸³ sehingga didapat paparan mengenai fakta-fakta, situasi-situasi atau kejadian-kejadian secara sistematis, faktual dan akurat.⁸⁴

2. Alasan Pemilihan Judul

Adapun alasan penulis mengajukan judul tersebut di atas adalah dengan melihat fenomena bahwasanya Muhammadiyah merupakan salah satu organisasi massa terbesar di Indonesia yang tujuan globalnya sejak didirikan sampai saat ini adalah memasyarakatkan prinsip *amar ma'ruf nahi munkar*. Dan tentu saja, Muhammadiyah memberikan kontribusi nyata terhadap reformasi politik di Indonesia, mengingat agenda reformasi itu sendiri menginginkan masyarakat bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Di samping itu, kita kenal pula tokoh Amien Rais yang merupakan elit Muhammadiyah sekaligus reformator politik yang digambarkan sebagai tokoh yang terang-terangan anti terhadap sistem politik Orde Baru.

3. Metode Pengumpulan Data

Adapun penelitian yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*) yang dilakukan di perpustakaan-perpustakaan atau lembaga-lembaga yang memiliki bahan referensi yang relevan dan wawancara. Wawancara adalah salah satu metode pengumpulan data guna mendapatkan informasi dengan cara mengadakan tanya jawab langsung dengan

⁸³ Jacob Vreden Bregt, *Pengantar Metodologi Untuk Ilmu Empiris*. Jakarta Gramedia, 1985. hal. 52.

⁸⁴ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta Rajawali, 1983, hal. 19.

Responden secara sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian, guna memperoleh informasi beberapa jenis data baik yang terpendam ataupun yang termanifestasi dalam perilaku sehari-hari. Wawancara ini tidak hanya bersifat formal, dalam arti mengadakan perjanjian terlebih dahulu dengan responden yang bersangkutan, namun juga dilakukan melalui tanya jawab yang tidak direncanakan dengan responden yang dianggap mampu memberikan kelengkapan data dan dianggap penting. Dalam penelitian ini yang menjadi responden adalah Bapak Prof. Dr. Amien Rais sebagai Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 1995-2000 sekaligus sebagai Bapak Reformator.

4. Metode Analisis Data

Proses analisa data dimulai dengan menelaah seluruh data yang telah diperoleh 15% dari beberapa sumber dalam hal ini dari studi dokumenter. Lebih lengkapnya tentang analisis data adalah seperti yang digunakan berikut.⁸⁶

Pertama, dilakukan reduksi dari proses membaca dengan hati-hati dari data yang terekam, identifikasi tema-tema utama dari proses penelitian tingkah laku dan sebagainya. Kedua, pengorganisasian data yang merupakan penyusunan kembali semua informasi sekitar tema-tema tertentu yang berkaitan dengan topik penelitian. Langkah terakhir adalah melakukan interpretasi, meliputi perbuatan keputusan dan penyusunan kesimpulan yang berkait dengan pertanyaan dengan penelitian.

⁸⁶ Winarno Surachmad, *op.cit.*, hal. 134